

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Agus P Erwan, Ratih Dyah S.2013.*Implementasi Kebijakan Publik konsep dan aplikasinya di Indonesia*, Gava media, Jakarta.

Bambang Sugono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Burhan Bungin, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Chabib Soleh dan Heru Rochansjah. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media

Dwiyanto Indiahono. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media.

Moh. Nazir.2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.

Sadu Wasistiono dan Irawan Tohir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. CV Fokus Media: Bandung.

Soerjono Soekanto.2013. *Metode Penelitian Hukum Sosiologis*.Rajawali Pers. Jakarta.

Solichin Abdul Wahab. 2008. *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

Suparmini, Agustina Tri Wijayanti. 2015. *Buku Ajar Masyarakat Desa Dan Kota (Tinjauan Geografis, Sosiologis Dan Historis)*. Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta.

Widjaja. 2002. *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.

Zainuddin Ali.2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016, Tentang Tata Cara Pengalokasian,
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 , Tentang Dana Desa yang
bersumber dari APBN

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pembentukan 13 (Tiga
Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat I Tapanuli Selatan, Tapanuli
Utara, Toba Samosir, Labuhan Batu, Dan Langkat Dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Sumatera Utara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

C. SUMBER LAIN

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 2015. *“Petunjuk Pelaksanaan
Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa”*. Tim Deputi Bidang
Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

Masalah serta solusi implementasi dana desa, terdapat pada
https://www.kompasiana.com/wiratama_adi_nugraha diakses pada tanggal 22_Desember
2015

Sony Walangitan, “Peranan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan
Pembangunan Desa (Suatu Studi di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat)”,

https://media.neliti.com/media/publications/1106-ID_peranan-badan-permusyawaratan-desa-bpd-dalam-perencanaan-pembangunan-desa diakses 21 Oktober 2022